



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SUB UNIT KERJA : UPTD BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN RINJANI BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUSTARA HADI**
2. Jabatan : **KEPALA UNIT**
3. NHK : **658098**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.404.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 7041 m2/7041 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 704.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 143.500.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 64.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.612.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.612.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.